

Evaluasi Upah Minimum Regional (UMR) dengan Statistik

Diana Fahira¹, Loranty Folia
Simanjuntak², Tira Al
Zahira³, Hawila Sabta
Pangaribuan⁴

Abstrak

Penelitian ini mengevaluasi Upah Minimum Regional (UMR) di Indonesia menggunakan metode statistik deskriptif untuk memahami distribusi, tren, dan disparitas upah minimum antarprovinsi. Data UMR dari berbagai provinsi dianalisis dengan melihat faktor-faktor ekonomi yang memengaruhi penetapannya, seperti inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan dalam UMR antarwilayah, dengan provinsi yang memiliki PDRB tinggi cenderung menetapkan UMR lebih tinggi. Selain itu, tingkat inflasi dan standar KHL juga memengaruhi variasi UMR. Analisis ini memberikan wawasan penting bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan pengupahan yang lebih adil dan efektif. Penelitian ini juga merekomendasikan adanya mekanisme evaluasi berkala untuk memastikan UMR yang ditetapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: Upah Minimum Regional, Statistik Deskriptif, PDRB, Kebutuhan Hidup Layak, Inflasi

Abstract

This study evaluates the Regional Minimum Wage (UMR) in Indonesia using descriptive statistical methods to understand the distribution, trends, and disparities of minimum wages across provinces. UMR data from various provinces were analyzed by examining economic factors influencing its determination, such as inflation, Gross Regional Domestic Product (GRDP), and Decent Living Needs (KHL). The findings reveal significant disparities in UMR across regions, with provinces having higher GRDP generally setting higher minimum wages. Additionally, inflation rates and KHL standards also contribute to UMR variations. This analysis provides valuable insights for policymakers in formulating more equitable and effective wage policies. The study also recommends the implementation of periodic evaluations to ensure that the established UMR improves workers' welfare without hindering economic growth.

Keywords: Regional Minimum Wage, Descriptive Statistics, GRDP, Decent Living Needs, Inflation

¹ Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Medan, email: dianafahira21@gmail.com

² Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Medan, email: lorantyfolia@unimed.ac.id

³ Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Medan, email: tiraalzahira957@gmail.com

⁴ Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Medan, email: hawilasabta98@gmail.com

PENDAHULUAN

Upah Minimum Regional (UMR) merupakan salah satu instrumen kebijakan ekonomi yang digunakan oleh pemerintah dalam rangka melindungi kesejahteraan pekerja dengan menetapkan batas minimum upah yang harus diterima oleh buruh atau pekerja di suatu wilayah tertentu. Penetapan UMR ini bertujuan untuk memastikan bahwa pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya serta meningkatkan kesejahteraan mereka dalam jangka panjang. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Namun, dalam implementasinya, kebijakan UMR sering kali menimbulkan kontroversi karena berbagai faktor, seperti perbedaan tingkat ekonomi antarwilayah, kondisi industri yang berbeda-beda, serta dampaknya terhadap pasar tenaga kerja secara keseluruhan. Penelitian yang dilakukan oleh Suryani (2021) menunjukkan bahwa kebijakan UMR memiliki dampak yang kompleks terhadap perekonomian daerah, di mana kenaikan UMR yang tidak diimbangi dengan produktivitas kerja justru dapat menurunkan daya saing industri lokal dan mempengaruhi keputusan investasi perusahaan. Oleh karena itu, analisis mengenai efektivitas kebijakan UMR dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja harus mempertimbangkan berbagai faktor yang melatarbelakangi dinamika ekonomi dan sosial yang terjadi di suatu wilayah.

Faktor ekonomi seperti Produk Domestik Bruto (PDRB), tingkat inflasi, dan produktivitas tenaga kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap penetapan UMR di suatu daerah. Daerah dengan PDRB yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat UMR yang lebih tinggi pula karena kapasitas ekonomi yang lebih besar dalam menyediakan upah yang lebih layak bagi pekerjanya. Di sisi lain, daerah dengan PDRB yang rendah sering kali menetapkan UMR yang lebih rendah untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi lokal dan mencegah terjadinya peningkatan angka pengangguran akibat ketidakmampuan pengusaha dalam membayar upah yang lebih tinggi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Putri (2022), terdapat korelasi positif antara PDRB suatu daerah dengan tingkat UMR yang ditetapkan, di mana peningkatan PDRB sebesar 1% dapat berkontribusi pada peningkatan UMR sebesar 0,5%. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi regional memainkan peran penting dalam menentukan kebijakan upah minimum, sehingga pemerintah perlu memastikan bahwa kenaikan UMR dilakukan secara proporsional dengan kondisi ekonomi daerah agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keberlanjutan industri dan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal.

Selain faktor ekonomi, aspek sosial seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga berperan penting dalam menentukan besaran UMR yang ditetapkan di suatu daerah. IPM merupakan indikator yang mencerminkan kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah berdasarkan tiga komponen utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Daerah dengan IPM yang lebih tinggi cenderung memiliki UMR yang lebih tinggi karena tingkat pendidikan yang lebih baik menghasilkan tenaga kerja yang lebih produktif dan memiliki keterampilan yang lebih tinggi. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2023), yang menemukan bahwa daerah dengan IPM tinggi mengalami peningkatan UMR yang lebih signifikan dibandingkan dengan daerah dengan IPM rendah. Studi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan satu poin dalam IPM dapat meningkatkan rata-rata UMR sebesar 3%, mengindikasikan bahwa pembangunan manusia yang berkualitas dapat menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui mekanisme penetapan upah minimum.

Oleh karena itu, strategi peningkatan UMR harus disertai dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan agar pekerja dapat memiliki daya saing yang lebih baik dalam pasar tenaga kerja yang semakin kompetitif.

Namun, meskipun kenaikan UMR bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, dalam beberapa kasus, kebijakan ini justru dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pasar tenaga kerja. Salah satu dampak yang paling sering terjadi adalah meningkatnya angka pengangguran akibat kenaikan biaya tenaga kerja yang tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas perusahaan. Ketika upah pekerja naik secara signifikan, perusahaan yang tidak mampu menyesuaikan dengan kenaikan biaya tenaga kerja cenderung mengurangi jumlah tenaga kerja atau bahkan melakukan otomatisasi dalam proses produksi untuk menghemat biaya operasional. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hakim (2020), kenaikan UMR yang terlalu tinggi dapat meningkatkan angka pengangguran terbuka sebesar 2% hingga 4% dalam jangka waktu satu tahun setelah kebijakan tersebut diterapkan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kenaikan UMR dan kemampuan industri dalam menyerap tenaga kerja agar kebijakan ini tidak berujung pada peningkatan pengangguran yang justru dapat merugikan pekerja itu sendiri.

Selain itu, disparitas UMR antarwilayah dapat memicu fenomena migrasi tenaga kerja dari daerah dengan UMR rendah ke daerah dengan UMR tinggi. Fenomena ini sering terjadi di Indonesia, di mana pekerja dari daerah dengan tingkat upah rendah berpindah ke kota-kota besar yang menawarkan UMR lebih tinggi demi memperoleh penghasilan yang lebih baik. Namun, migrasi tenaga kerja ini juga dapat menimbulkan masalah baru, seperti meningkatnya tekanan pada infrastruktur dan layanan publik di daerah tujuan migrasi, serta berkurangnya tenaga kerja produktif di daerah asal migrasi. Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2021) menunjukkan bahwa perbedaan UMR antarwilayah di Indonesia memiliki dampak langsung terhadap pola migrasi tenaga kerja, di mana kenaikan UMR sebesar 10% di suatu daerah dapat meningkatkan arus migrasi tenaga kerja masuk sebesar 5%. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan UMR tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi dan ketenagakerjaan, tetapi juga mempengaruhi dinamika sosial dan demografi di suatu wilayah.

Dalam konteks globalisasi dan persaingan ekonomi yang semakin ketat, kebijakan UMR juga harus mempertimbangkan daya saing industri lokal dalam menghadapi kompetisi dengan negara lain. Kenaikan UMR yang tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas dapat meningkatkan biaya produksi dan menurunkan daya saing produk lokal di pasar internasional. Sebagai contoh, sektor manufaktur yang bergantung pada tenaga kerja dalam jumlah besar sering kali mengalami tekanan akibat kenaikan upah minimum yang menyebabkan peningkatan biaya operasional. Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2023) menemukan bahwa kenaikan UMR sebesar 15% dapat menyebabkan penurunan ekspor sektor manufaktur hingga 8% akibat meningkatnya harga produk yang membuatnya kurang kompetitif di pasar global. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengembangkan strategi peningkatan upah yang sejalan dengan upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja, seperti melalui program pelatihan keterampilan, investasi dalam teknologi, serta insentif bagi perusahaan yang meningkatkan efisiensi produksi.

Berdasarkan berbagai penelitian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan UMR memiliki dampak yang kompleks terhadap perekonomian, kesejahteraan pekerja, dan dinamika pasar tenaga kerja. Faktor-faktor seperti PDRB, IPM, tingkat inflasi, dan daya saing industri memainkan peran penting dalam

menentukan efektivitas kebijakan ini dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, dalam menetapkan kebijakan UMR, pemerintah perlu mengadopsi pendekatan yang berbasis pada data dan bukti empiris agar keputusan yang diambil dapat memberikan manfaat maksimal bagi pekerja, industri, dan perekonomian secara keseluruhan. Dengan demikian, kebijakan UMR yang tepat tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan pekerja, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan statistik deskriptif untuk mengevaluasi tren dan pola Upah Minimum Regional (UMR) di berbagai daerah di Indonesia. Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data historis UMR dalam lima tahun terakhir guna mengidentifikasi pola perubahan, disparitas antarwilayah, serta korelasi dengan faktor ekonomi seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan tingkat inflasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari laporan resmi Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Ketenagakerjaan, dan publikasi ilmiah terkait yang membahas dinamika ketenagakerjaan di Indonesia. Analisis dilakukan dengan menggunakan teknik pemusatan data seperti mean dan median, serta penyebaran data melalui standar deviasi untuk memahami fluktuasi UMR dari tahun ke tahun. Selain itu, grafik tren juga digunakan untuk memvisualisasikan pola pertumbuhan UMR dan kesenjangan upah antarwilayah.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap laporan resmi dan literatur akademik yang relevan dengan kebijakan upah minimum. Data sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memahami tren dan pola dalam kebijakan upah minimum. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi hubungan antara UMR dan faktor-faktor ekonomi melalui analisis kualitatif berdasarkan literatur yang relevan, guna memahami bagaimana perubahan dalam variabel ekonomi dapat mempengaruhi kebijakan upah minimum di berbagai daerah.

Untuk meningkatkan validitas penelitian, triangulasi data dilakukan dengan membandingkan hasil analisis statistik dengan temuan dari penelitian terdahulu yang telah diterbitkan dalam jurnal ilmiah dalam empat tahun terakhir. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan memiliki dasar empiris yang kuat dan tidak hanya bergantung pada satu sumber data saja. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan faktor-faktor kebijakan pemerintah yang mempengaruhi penetapan UMR, termasuk kebijakan stimulus ekonomi dan perubahan regulasi ketenagakerjaan. Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas kebijakan UMR dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja serta dampaknya terhadap kondisi ekonomi dan pasar tenaga kerja di Indonesia.

HASIL DAN PEMBHASAN

Tabel 1. Tren Kenaikan UMR di Indonesia (2019–2024)

Tahun	Rata-rata UMR Nasional (Rp)	Persentase Kenaikan (%)	Inflasi (%)	PDB Nasional (%)
2019	2.500.000	-	3.2	5.0
2020	2.650.000	6.0	2.9	-2.1
2021	2.700.000	1.9	1.6	3.7

2022	2.850.000	5.6	5.5	5.3
2023	3.000.000	5.3	3.5	5.1
2024	3.200.000	6.7	2.9	5.4

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) <https://www.bps.go.id>

Data menunjukkan bahwa rata-rata UMR mengalami kenaikan setiap tahun dengan fluktuasi yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, inflasi, dan pertumbuhan PDB. Kenaikan tertinggi terjadi pada 2024 sebesar 6,7%, sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional.

Tabel 2. Distribusi UMR Antarprovinsi Tahun 2024

Provinsi	UMR (Rp)	PDRB Per Kapita (Juta Rp)	IPM	Tingkat Pengangguran (%)
DKI Jakarta	5.100.000	230	81.65	7.8
Jawa Barat	3.400.000	155	72.45	9.2
Jawa Tengah	2.850.000	95	71.30	5.9
Jawa Timur	2.950.000	102	72.65	5.2
Sumatera Utara	3.250.000	120	73.20	6.5
Sulawesi Selatan	3.100.000	110	74.50	4.8

Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan RI <https://www.bps.go.id>

Perbedaan UMR antarprovinsi mencerminkan kondisi ekonomi lokal dan tingkat produktivitas masing-masing daerah. DKI Jakarta memiliki UMR tertinggi, didukung oleh PDRB per kapita yang besar dan tingkat IPM yang tinggi.

Tabel 3. Korelasi UMR dengan Faktor Ekonomi

Faktor Ekonomi	Korelasi dengan UMR ®
PDRB Per Kapita	0.85 (Kuat, Positif)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	0.78 (Kuat, Positif)
Inflasi	-0.62 (Sedang, Negatif)
Tingkat Pengangguran	-0.70 (Kuat, Negatif)

Sumber : <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/download/2095/1042>

Hasil korelasi menunjukkan bahwa UMR memiliki hubungan positif yang kuat dengan PDRB per kapita dan IPM, menandakan bahwa daerah dengan ekonomi yang lebih kuat dan penduduk yang lebih berkualitas cenderung memiliki UMR lebih tinggi. Sebaliknya, UMR cenderung lebih rendah di daerah dengan inflasi tinggi dan tingkat pengangguran yang tinggi.

Menurut Sugiyono (2017), interpretasi nilai korelasi adalah 0.00 – 0.19: Korelasi sangat lemah, 0.20 – 0.39: korelasi lemah, 0.40 – 0.59: korelasi sedang, 0.60 – 0.79: korelasi kuat, 0.80 – 1.00: korelasi sangat kuat.

Hasil analisis menunjukkan bahwa UMR memiliki hubungan positif yang kuat dengan PDRB per kapita ($r = 0,85$) dan IPM ($r = 0,78$). Artinya, daerah dengan tingkat PDRB per kapita yang lebih tinggi serta kualitas hidup yang lebih baik cenderung memiliki UMR yang lebih tinggi.

Di sisi lain, UMR memiliki hubungan negatif dengan inflasi ($r = -0,62$) dan tingkat pengangguran ($r = -0,70$). Korelasi negatif dengan inflasi menunjukkan bahwa kenaikan UMR cenderung berbanding terbalik dengan inflasi, meskipun tidak dalam hubungan yang sangat kuat. Sementara itu, korelasi negatif yang kuat dengan tingkat pengangguran mengindikasikan bahwa daerah dengan UMR lebih tinggi cenderung memiliki tingkat pengangguran yang lebih rendah.

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa peningkatan UMR berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, hubungannya yang negatif dengan inflasi dan pengangguran menunjukkan bahwa kebijakan UMR yang lebih tinggi dapat berkontribusi dalam menekan angka pengangguran serta menjaga stabilitas harga dalam kondisi tertentu.

Tabel 4. Disparitas UMR di Pulau Jawa Tahun 2024

Provinsi	UMR Tertinggi (Rp)	UMR Terendah (Rp)	Selisih (Rp)	Selisih (%)
Jawa Barat	4.590.000	2.000.000	2.590.000	129.5%
Jawa Tengah	2.950.000	1.958.000	992.000	50.7%
Jawa Timur	4.375.000	2.100.000	2.275.000	108.3%

Sumber: BPS, laporan pemerintah daerah, dan Kementerian Ketenagakerjaan

Terdapat kesenjangan yang cukup besar antara UMR tertinggi dan terendah dalam satu provinsi. Disparitas ini berpotensi menciptakan migrasi tenaga kerja dari daerah dengan UMR rendah ke daerah dengan UMR tinggi, yang bisa berdampak pada ketimpangan ekonomi di dalam provinsi.

Tren Kenaikan UMR di Indonesia (2019–2024)

Kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) di Indonesia selama lima tahun terakhir menunjukkan pola yang konsisten, dengan peningkatan tahunan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1, rata-rata UMR nasional terus meningkat dari Rp2.500.000 pada tahun 2019 menjadi Rp3.200.000 pada tahun 2024. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2024, yaitu sebesar 6,7%, yang sejalan dengan pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19. Kenaikan ini juga menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk menjaga kesejahteraan pekerja di tengah tekanan inflasi yang masih terjadi. Namun, meskipun peningkatan UMR terlihat signifikan, daya beli pekerja tetap bergantung pada tingkat inflasi dan biaya hidup di setiap daerah.

Dinamika kenaikan UMR juga dipengaruhi oleh kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Pada tahun 2020, misalnya, kenaikan UMR hanya sebesar 6,0% akibat dampak pandemi yang menyebabkan kontraksi ekonomi sebesar -2,1%. Tahun berikutnya, pertumbuhan UMR melambat menjadi 1,9% karena pemulihan ekonomi yang belum stabil, dengan inflasi yang turun menjadi 1,6%. Namun, sejak tahun 2022, pertumbuhan UMR kembali meningkat sejalan dengan pemulihan ekonomi yang lebih kuat, dengan pertumbuhan PDB yang mencapai 5,3%. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan kenaikan upah minimum sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasional serta kebijakan moneter yang diterapkan oleh pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara upah dan inflasi.

Kenaikan UMR juga memiliki dampak yang signifikan terhadap sektor industri dan ketenagakerjaan. Beberapa sektor, terutama industri padat karya seperti tekstil dan manufaktur, cenderung mengalami tekanan akibat kenaikan biaya tenaga kerja. Di sisi lain, sektor yang memiliki margin keuntungan lebih tinggi, seperti teknologi dan jasa keuangan, dapat lebih mudah menyesuaikan diri dengan kebijakan kenaikan UMR. Dengan demikian, meskipun peningkatan UMR bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, kebijakan ini juga harus mempertimbangkan daya saing industri serta kemampuan perusahaan dalam menyesuaikan struktur biaya mereka agar tidak berdampak negatif terhadap tingkat pengangguran.

Distribusi UMR Antarprovinsi Tahun 2024

Perbedaan UMR antarprovinsi di Indonesia mencerminkan kondisi ekonomi, tingkat produktivitas, serta tingkat kesejahteraan masyarakat di masing-masing wilayah.

Sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2, DKI Jakarta memiliki UMR tertinggi sebesar Rp5.100.000, jauh lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Hal ini disebabkan oleh PDRB per kapita yang tinggi (Rp230 juta) serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 81,65. Sebaliknya, provinsi seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur memiliki UMR yang lebih rendah, meskipun tetap mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Perbedaan ini mencerminkan kesenjangan ekonomi antara daerah metropolitan dan daerah dengan sektor industri yang masih berkembang.

Selain faktor ekonomi, penetapan UMR juga dipengaruhi oleh tingkat pengangguran di suatu wilayah. Jawa Barat, misalnya, memiliki tingkat pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan provinsi lain, yaitu 9,2%, yang menunjukkan bahwa kenaikan UMR di wilayah tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan pekerja. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk tingginya jumlah pencari kerja serta rendahnya daya serap industri terhadap tenaga kerja baru. Sebaliknya, Sulawesi Selatan dengan tingkat pengangguran yang lebih rendah (4,8%) menunjukkan bahwa UMR yang relatif tinggi di provinsi tersebut lebih didukung oleh kestabilan ekonomi dan lapangan pekerjaan yang lebih baik.

Perbedaan UMR antarprovinsi juga berimplikasi pada pola migrasi tenaga kerja. Banyak pekerja dari daerah dengan UMR rendah seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur yang memilih untuk bekerja di DKI Jakarta atau Jawa Barat demi mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Namun, migrasi tenaga kerja ini dapat menyebabkan ketimpangan pembangunan, di mana daerah dengan UMR lebih rendah akan mengalami brain drain karena banyak tenaga kerja berkualitas yang berpindah ke daerah dengan UMR lebih tinggi. Oleh karena itu, kebijakan UMR sebaiknya tidak hanya difokuskan pada peningkatan nominal upah, tetapi juga harus diimbangi dengan kebijakan peningkatan daya saing ekonomi dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Korelasi UMR dengan Faktor Ekonomi

Hubungan antara UMR dan faktor ekonomi sangat kompleks, di mana berbagai variabel seperti PDRB per kapita, IPM, inflasi, dan tingkat pengangguran memainkan peran penting dalam menentukan besaran upah minimum di suatu daerah. Berdasarkan data dalam Tabel 3, terdapat korelasi positif yang kuat antara UMR dan PDRB per kapita ($r = 0.85$), yang menunjukkan bahwa daerah dengan ekonomi yang lebih kuat cenderung memiliki upah minimum yang lebih tinggi. Korelasi positif yang hampir serupa juga terlihat antara UMR dan IPM ($r = 0.78$), yang mengindikasikan bahwa daerah dengan kualitas hidup lebih baik umumnya memiliki tingkat upah yang lebih tinggi.

Sebaliknya, terdapat korelasi negatif antara UMR dan inflasi ($r = -0.62$), yang berarti bahwa kenaikan inflasi cenderung menekan pertumbuhan UMR. Hal ini dapat dijelaskan oleh kebijakan pemerintah yang cenderung menahan kenaikan UMR dalam kondisi inflasi tinggi untuk menghindari tekanan biaya yang berlebihan pada sektor usaha. Selain itu, tingkat pengangguran juga menunjukkan korelasi negatif yang kuat dengan UMR ($r = -0.70$), yang mengindikasikan bahwa daerah dengan tingkat pengangguran tinggi cenderung memiliki UMR yang lebih rendah. Korelasi ini mencerminkan bahwa peningkatan UMR yang terlalu tinggi dapat menyebabkan perusahaan mengurangi jumlah tenaga kerja untuk mengurangi biaya operasional, sehingga meningkatkan tingkat pengangguran.

Implikasi dari hasil ini adalah bahwa kebijakan UMR harus mempertimbangkan keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan daya saing ekonomi. Jika kenaikan UMR tidak diiringi dengan peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, maka

kebijakan ini dapat berdampak negatif pada tingkat pengangguran dan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan kenaikan UMR tidak hanya berfokus pada peningkatan nominal upah, tetapi juga didukung oleh strategi penguatan ekonomi seperti peningkatan investasi, pelatihan tenaga kerja, serta kebijakan industrialisasi yang mampu menciptakan lebih banyak lapangan kerja dengan upah yang layak.

Disparitas UMR di Pulau Jawa Tahun 2024

Disparitas UMR di dalam satu provinsi menjadi tantangan besar dalam kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia. Sebagaimana terlihat dalam Tabel 4, selisih UMR tertinggi dan terendah di satu provinsi dapat mencapai lebih dari 100%. Di Jawa Barat, misalnya, terdapat perbedaan hingga Rp2.590.000 antara UMR tertinggi dan terendah, sementara di Jawa Timur selisihnya mencapai Rp2.275.000. Perbedaan ini dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi di dalam provinsi yang sama, di mana daerah dengan UMR lebih rendah cenderung mengalami keterlambatan dalam pertumbuhan ekonomi dibandingkan daerah dengan UMR lebih tinggi.

Kesenjangan ini juga berdampak pada mobilitas tenaga kerja di dalam provinsi, di mana pekerja dari daerah dengan UMR rendah cenderung berpindah ke daerah dengan UMR lebih tinggi untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik. Hal ini dapat meningkatkan beban ekonomi di kota-kota besar yang sudah padat penduduk, sementara daerah dengan UMR lebih rendah mengalami kekurangan tenaga kerja berkualitas. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah perlu menerapkan kebijakan pemerataan ekonomi, seperti insentif investasi di daerah dengan UMR lebih rendah serta peningkatan infrastruktur dan fasilitas publik untuk menarik lebih banyak industri ke daerah tersebut.

Pemerintah juga harus mengevaluasi mekanisme penetapan UMR agar lebih adil dan tidak menimbulkan ketimpangan yang berlebihan. Salah satu solusinya adalah dengan menyesuaikan UMR berdasarkan sektor industri dan tingkat biaya hidup di setiap daerah, sehingga pekerja mendapatkan upah yang layak tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi daerah yang masih berkembang.

Kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) di Indonesia dalam lima tahun terakhir menunjukkan pola yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan kebijakan ketenagakerjaan. Dari data yang telah disajikan, terlihat bahwa tren kenaikan UMR mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, terutama pada masa pandemi COVID-19 dan pascapemulihian ekonomi. Faktor utama yang mempengaruhi kenaikan UMR adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan kondisi pasar tenaga kerja di setiap daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah menerapkan kebijakan penyesuaian UMR yang didasarkan pada formula yang lebih transparan dan berbasis data ekonomi, sehingga keputusan kenaikan upah tidak hanya mempertimbangkan kesejahteraan pekerja, tetapi juga dampaknya terhadap sektor usaha. Namun, kebijakan ini masih menuai berbagai respons dari berbagai pihak, terutama dari kalangan pengusaha yang merasa bahwa kenaikan upah yang terlalu tinggi dapat membebani biaya operasional dan berpotensi menyebabkan pengurangan tenaga kerja. Oleh karena itu, perumusan kebijakan UMR harus selalu mempertimbangkan keseimbangan antara hak pekerja untuk mendapatkan upah layak dan daya saing industri dalam mempertahankan keberlanjutan bisnisnya.

Selain disparitas antarprovinsi, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara UMR dengan faktor-faktor ekonomi seperti PDRB per kapita, IPM, inflasi, dan tingkat pengangguran. Korelasi positif antara UMR dan PDRB per

kapita menunjukkan bahwa daerah dengan ekonomi yang lebih kuat cenderung memiliki upah minimum yang lebih tinggi, karena sektor usaha di daerah tersebut lebih mampu membayar tenaga kerja dengan upah yang lebih layak. Demikian pula, korelasi positif antara UMR dan IPM menegaskan bahwa daerah dengan kualitas hidup yang lebih baik biasanya memiliki tingkat upah yang lebih tinggi. Namun, korelasi negatif antara UMR dengan inflasi dan tingkat pengangguran menunjukkan bahwa kenaikan UMR yang terlalu tinggi dapat berisiko meningkatkan tekanan inflasi serta menambah jumlah pengangguran akibat berkurangnya lapangan kerja yang tersedia. Oleh karena itu, kebijakan kenaikan UMR harus selalu mempertimbangkan faktor ekonomi secara menyeluruh agar tidak menimbulkan efek samping yang merugikan bagi pekerja maupun dunia usaha.

Selanjutnya, perbedaan UMR dalam satu provinsi juga menjadi tantangan tersendiri dalam kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia. Beberapa provinsi, terutama yang memiliki kota-kota besar dan daerah industri yang berkembang, menunjukkan selisih yang sangat tinggi antara UMR tertinggi dan terendah dalam satu wilayah. Di Jawa Barat, misalnya, terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara upah di daerah industri maju seperti Karawang dan Bekasi dengan daerah yang masih berkembang seperti Cianjur atau Tasikmalaya. Perbedaan ini menyebabkan ketimpangan ekonomi di dalam provinsi yang sama, di mana daerah dengan UMR lebih rendah cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dibandingkan daerah yang memiliki UMR lebih tinggi. Selain itu, fenomena migrasi tenaga kerja di dalam provinsi juga dapat meningkatkan beban ekonomi di daerah perkotaan yang sudah padat penduduk, sementara daerah dengan UMR rendah mengalami kekurangan tenaga kerja berkualitas. Oleh karena itu, kebijakan penyesuaian UMR sebaiknya tidak hanya berbasis pada faktor ekonomi makro, tetapi juga mempertimbangkan kondisi spesifik di setiap daerah agar tidak menimbulkan ketimpangan yang berlebihan.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan UMR harus dirancang secara komprehensif dengan mempertimbangkan faktor ekonomi dan sosial. Kenaikan UMR yang terlalu tinggi dapat berdampak negatif pada ekonomi dan pengangguran, sementara kenaikan yang terlalu rendah menurunkan daya beli dan memperburuk ketimpangan sosial. Diperlukan kebijakan seimbang antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan industri, serta strategi pemerataan ekonomi untuk mengurangi disparitas UMR. Dengan kebijakan yang tepat, kenaikan UMR dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga stabilitas ekonomi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa evaluasi Upah Minimum Regional (UMR) di Indonesia menunjukkan adanya tren kenaikan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan kebijakan ketenagakerjaan, seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan daya saing industri di setiap daerah. Disparitas upah yang cukup signifikan antarprovinsi maupun dalam satu provinsi menunjukkan bahwa kebijakan UMR tidak hanya dipengaruhi oleh faktor makroekonomi, tetapi juga oleh karakteristik ekonomi lokal yang berbeda-beda, di mana daerah dengan tingkat produktivitas dan PDRB lebih tinggi cenderung memiliki UMR yang lebih besar dibandingkan daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang masih berkembang. Selain itu, hasil penelitian juga menyoroti bahwa kenaikan UMR yang terlalu tinggi tanpa mempertimbangkan keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan daya saing industri dapat berisiko meningkatkan inflasi, menghambat investasi, serta memicu peningkatan

angka pengangguran akibat berkurangnya daya serap tenaga kerja, sementara kenaikan UMR yang terlalu rendah dapat berdampak pada penurunan daya beli pekerja dan memperbesar kesenjangan sosial ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif dalam menetapkan UMR dengan mempertimbangkan keseimbangan antara aspek ekonomi dan sosial, sehingga tidak hanya melindungi kesejahteraan pekerja, tetapi juga memastikan keberlanjutan bisnis dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di seluruh wilayah Indonesia.

REFERENSI

- Ahmad, R., & Suryani, T. (2021). Analisis kenaikan UMR terhadap kesejahteraan pekerja sektor industri. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 9(2), 150-165.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Ekonomi Makro "Upah Minimum Regional".
- Budiarto, A., & Nugraha, P. (2022). Dampak kebijakan UMR terhadap daya beli masyarakat di perkotaan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, 12(1), 87-102.
- Cahyana, S., & Lestari, D. (2023). Kesenjangan upah regional dan faktor yang mempengaruhinya di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial*, 15(3), 203-220.
- Dewantara, H. (2021). Evaluasi kebijakan UMR dalam mendukung kesejahteraan pekerja informal. *Jurnal Kebijakan Publik dan Ekonomi*, 8(2), 112-129.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2024). Pengaruh faktor ekonomi terhadap ketenagakerjaan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan DPR RI*
- Fadilah, M., & Setiawan, R. (2022). Peran upah minimum dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja di sektor manufaktur. *Jurnal Manajemen dan Ketenagakerjaan*, 11(4), 176-192.
- Gunawan, A., & Prasetyo, B. (2023). Pengaruh UMR terhadap tingkat pengangguran di daerah tertinggal. *Jurnal Ekonomi Regional*, 14(2), 98-115.
- Hidayat, T., & Sari, P. (2020). Kebijakan UMR dalam perspektif kesejahteraan pekerja dan pengusaha. *Jurnal Ekonomi Makro Indonesia*, 7(1), 34-49.
- Iskandar, M. (2023). Analisis tren UMR di Indonesia dalam lima tahun terakhir. *Jurnal Statistik dan Ekonomi Indonesia*, 13(3), 220-237.
- Junaidi, F., & Ramadhani, S. (2021). Implikasi UMR terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 10(2), 155-170.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2024). Beranda Kementerian Ketenagakerjaan RI.
- Kurniawan, E., & Putri, D. (2022). Evaluasi implementasi kebijakan UMR berdasarkan kondisi ekonomi regional. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Ekonomi*, 12(1), 99-118.
- Lestari, R., & Sudirman, Y. (2023). Perbandingan dampak UMR pada sektor formal dan informal. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 15(2), 132-148.
- Mulyadi, A. (2021). Faktor penentu penetapan UMR di Indonesia: Sebuah kajian empiris. *Jurnal Ekonomi Mikro dan Makro Indonesia*, 9(3), 178-195.
- Nurdin, R., & Wibowo, T. (2022). Upah minimum dan kesejahteraan pekerja di sektor jasa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Terapan*, 11(2), 142-159.
- Prasetya, L., & Wahyuni, K. (2023). Determinan penetapan UMR dan dampaknya terhadap investasi. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Bisnis*, 13(1), 88-104.
- Syahrul, M., & Rahman, D. (2021). Hubungan antara kenaikan UMR dan tingkat inflasi di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Ekonomi Pembangunan*, 8(4), 190-205.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.